

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Rahmawati dan Achmad (2012), melakukan penelitian untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Financial Corporate Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011, dan diperoleh 107 perusahaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bukan yang menentukan peningkatan harga saham dan pembagian deviden. Akan tetapi hasil penilaian kinerja lingkungan memberikan dampak positif terhadap CSR yang artinya dengan penilaian tersebut memberikan pengungkapan sosial yang lebih luas pada perusahaan. Selain itu, kinerja lingkungan, CSR *disclosure* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja finansial yang artinya pengungkapan sosial yang lebih luas oleh manajemen akan memberikan peningkatan pada harga saham di bursa saham.

Yudianti (2015), melakukan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja finansial dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2012-2013 dan diperoleh 39 perusahaan yang menjadi sampel. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja finansial yang artinya semakin baik peringkat kinerja lingkungan

yang diberikan belum mampu meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Akan tetapi kinerja lingkungan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sehingga dapat dikatakan semakin baik kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan, dibuktikan dengan semakin tinggi pencapaian peringkat penilaian maka pengungkapan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi. Selain itu, CSR tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja finansial, maka pengungkapan CSR terbukti bukan merupakan variabel intervening antara hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja finansial.

Nur dan Priantinah (2012), penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR di Indonesia. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan berkategori *High Profile* yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, dan diperoleh 66 sampel penelitian. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan dan cenderung untuk mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat agar tidak menjadi sorotan dari para investor. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia secara umum belum mempedulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

Badjuri (2011), penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai faktor-faktor fundamental, mekanisme *Corporate Governance*, pengungkapan CSR perusahaan manufaktur dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

dan sumber daya alam yang go public di BEI tahun 2009 dan telah melaporkan aktifitas pengungkapan CSR, terdapat 77 sampel berdasarkan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial ketika memperoleh profit yang tinggi. Yang artinya perusahaan di Indonesia mulai menganggap pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia mampu memberikan monitor yang positif dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam pengungkapan CSR.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Stakeholder Theory

Djakman,dkk (2011:4) mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan adalah perorangan atau entitas yang memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi dan keberhasilan perusahaan. Pemangku kepentingan dibedakan menjadi empat kategori yaitu pemangku kepentingan pasar modal, pemangku kepentingan pasar barang atau jasa, pemangku kepentingan pemerintah dan pemangku kepentingan internal.

Horne dan Wachowicz (2013:6), mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah semua konstituen yang berkepentingan dalam keuntungan perusahaan. Mereka meliputi pemegang saham, kreditur, pelanggan, pegawai, pemasok dan masyarakat setempat. Hanya melalui perhatian ke berbagai

hal penting yang diperhatikan pemangku kepentingan perusahaan maka perusahaan dapat mencapai tujuan akhirnya untuk mencapai kesejahteraan para pemegang saham.

2.2.2. *Legitimacy Theory*

Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, atau dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Deegan (2002), mendefinisikan *legitimacy theory* sebagai berikut:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi dimasyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit. Dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki.”

Sehingga dapat diartikan dimana setiap perusahaan memiliki interaksi sosial dengan masyarakat baik itu secara terang-terangan maupun secara halus. Jika suatu perusahaan memenuhi norma dan nilai yang telah berlaku dimasyarakat maka para *stakeholder* juga akan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan norma maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang akan menimbulkan biaya kontak sosial yang lebih tinggi. Dengan kata lain setiap perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program kinerja sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat.

Lindblom (1994) dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa dalam suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi

berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi mungkin :

1. Mencoba untuk mendidik *stakeholdernya* tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
2. Mencoba untuk merubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi)
3. Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengkonstruksikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan)
4. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya

2.2.3. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Gray et al., (2001) dalam Oktalia (2014) menyatakan bahwa *CSR Disclosure* merupakan proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggung jawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial.

Pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur pelaksanaannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2007) paragraph 9 yang secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Wolk dan Ternay (1989) dalam Utomo (2000), Tujuan pengungkapan menurut *Securities Exchange Commission* (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu

1. *Protective disclosure*, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor
2. *Informative disclosure*, yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan

2.2.4. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah usaha yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi lingkungan.

Di Indonesia, kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER). Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 tahun 2014, PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun. PROPER dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dilakukan terhadap tingkat :

- a. Ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan dibidang :
 1. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
 3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2.2.5. Struktur Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan adalah komposisi kepemilikan dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki, menurut Mehran et al (1992) yang dikutip Ainul (2004:33) struktur kepemilikan menjadi 3, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik.

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/ masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham dibawah 5% yang berada diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Putri, dalam Puspitasari, 2009).

2.2.6. Kinerja Ekonomi

Utomo (1999) berpendapat bahwa selama ini kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Padahal rasio keuangan ini sangatlah bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Sehingga seringkali kinerja perusahaan terlihat baik dan meningkat, yang mana sebenarnya kinerja tidak mengalami peningkatan dan bahkan menurun.

Menurut Sugiyanto (2011), kinerja keuangan merupakan capaian suatu organisasi yang diukur berdasarkan aspek *financial*. Alat analisis yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Tetapi penggunaan rasio keuangan memiliki kelemahan utama yaitu mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk mengetahui apakah perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak. Untuk itu dikembangkan konsep *Economic Value Added* (EVA).

2.2.6.1. Laporan Keuangan

Djakman,dkk (2011:22) mengungkapkan laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi kejadian keuangan perusahaan. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perseroan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca dan laporan arus kas.

Dengan laporan keuangan inilah para analis dan investor menjadikannya sebagai suatu sarana informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut karena dalam laporan keuangan memuat posisi keuangan perusahaan dan hasil

usaha dalam suatu periode tertentu dengan kata lain laporan keuangan mencerminkan nilai dari suatu perusahaan.

Sistem atau proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan ini terdiri dari (Djakman,dkk, 2011:22):

1. Laporan laba rugi (*income statements*) adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.
2. Laporan ekuitas pemilik (*statement of owner's equity*) adalah ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.
3. Neraca (*balance sheet*) adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flows*) adalah ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.

2.2.6.2. Economic Value Added (EVA)

Horne dan Wachowicz (2013:106), mengungkapkan bahwa cara lain untuk menjelaskan fakta bahwa untuk menciptakan nilai, perusahaan harus mendapatkan imbal hasil atas modal yang diinvestasikan lebih besar dari biaya modal nya, melalui konsep nilai tambah ekonomis (*Economic Value Added-EVA*). Secara lebih spesifik, EVA adalah laba operasional setelah neto setelah pajak (*Net Operating Profit After Tax-NOPAT*) dikurangi beban nilai biaya modal untuk

modal yang digunakan. Total biaya modal adalah rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital-WACC*) dari setiap tingkat imbal hasil yang diminta (biaya) (Horne dan Wachowicz (2013:91).

Puspitawati (2009:4) mengungkapkan EVA merupakan inovasi penting karena selain tidak hanya merumuskan konsep keuangan modern tetapi *up to date* dari konsep ini telah membantu para manajer untuk lebih memahami tujuan keuangan dan membantu mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempermudah akses bagi manajer untuk memahami aspek keuangan yang terkadang rumit untuk dipahami sehingga membentuk suatu pola berpikir sistematis bagi pengambil keputusan.

2.2.6.2.1 Cara Menghitung *Economic Value Added* (EVA)

Rumus menghitung EVA (Horne dan Wachowicz, 2013):

$$\text{EVA} = \text{Net Operating Profit After Tax (NOPAT)} - \text{Cost of Capital (COC)}$$

NOPAT : laba /rugi usaha - pajak

COC : WACC x *Invested Capital* (IC)

NOPAT (*Net Operating After Tax*) merupakan merupakan laba operasi perusahaan setelah pajak dan mengukur laba yang diperoleh dari operasi berjalan.

Biaya modal (*Cost Of Capital*) perusahaan keseluruhan akan mencerminkan biaya-biaya yang dikombinasikan dari semua sumber keuangan yang digunakan perusahaan.

Perhitungan *Invested Capital* (IC):

$$\text{IC} = \text{Total Hutang dan Ekuitas} - \text{Hutang Jangka Pendek}$$

Perhitungan WACC (Brigham dan Houston, 2006:26) :

$$WACC = [(W_d \times K_d) (1-T) + (W_e \times K_e)]$$

Keterangan:

$$\text{Cost of Debt } (K_d) = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi Hutang } (W_d) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Hutang} + \text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Cost of Equity } (K_e) = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi Ekuitas } (W_e) = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Hutang} + \text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi Pajak } (T) = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan EVA akan bernilai lebih besar dari nol (positif, lebih kecil dari nol (negatif) dan sama dengan nol, berarti:

- a. Kondisi EVA positif ($EVA > 0$) mencerminkan tingkat kompensasi (nilai kekayaan) yang lebih tinggi daripada tingkat biaya modal. Ini berarti manajemen telah mampu menciptakan peningkatan nilai kekayaan perusahaan. Semakin positif EVA, berarti semakin bagus kinerja perusahaan tersebut, yaitu manajemen telah menjalankan tugasnya dengan baik.

- b. Kondisi EVA negatif ($EVA < 0$) menunjukkan adanya penurunan nilai kekayaan karena laba yang tersedia tidak mampu memberikan kompensasi setimpal dengan investasi yang ditanam.
- c. Kondisi EVA sama dengan nol ($EVA = 0$) berarti laba yang tersedia impas untuk memenuhi harapan pemodal dan kinerja keuangan perusahaan masih tergolong sehat.

2.3. Hipotesis

2.3.1. Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan CSR

Menurut Verechia (1983) dalam Rahawati (2012), dengan *discretionary disclosure* teorinya mengatakan pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan *performance* mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan *environmental performance* yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan perusahaan dengan *environmental performance* yang lebih buruk (Sudaryanto, 2011).

Tren global yang terjadi saat ini adalah dengan mulai dimasukkannya pertimbangan perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas pasar modal. Semakin banyak peran perusahaan dalam kegiatan lingkungannya, maka akan semakin banyak pula yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya (Oktalia, 2010).

Penelitian dari Al-Tuwaijiri, *et al.* (2004) yang menemukan hubungan positif signifikan antara *environmental disclosure* dengan *environmental performance* mendukung teori tersebut. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian

Rakhiemah (2009) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian ini adalah

H1: Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR

2.3.2. Hubungan Antara Struktur Kepemilikan Publik dengan Pengungkapan CSR

Menurut Badjuri (2011), perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (*deviden*) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*) sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial yang lebih luas.

Dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik maka perusahaan menganggap memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas sehingga perusahaan akan menganggap pengungkapan sosial sebagai realisasi tanggung jawab mereka.

Penelitian oleh Hasibuan (2001) dalam Nur (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan saham publik dalam perusahaan diprediksi akan melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas. Berdasarkan asumsi diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR

2.3.3. Hubungan Antara Kinerja Ekonomi (EVA) dengan Pengungkapan CSR

Friedman (1980) dalam Yuniarta (2011), menyatakan pandangan bahwa perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial merupakan kesalahan konsep fundamental dari sifat dan karakter ekonomi bebas. Dalam ekonomi bebas, hanya ada ssatu tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pelaku bisnis yaitu, menggunakan sumber daya dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan selama mungkin.

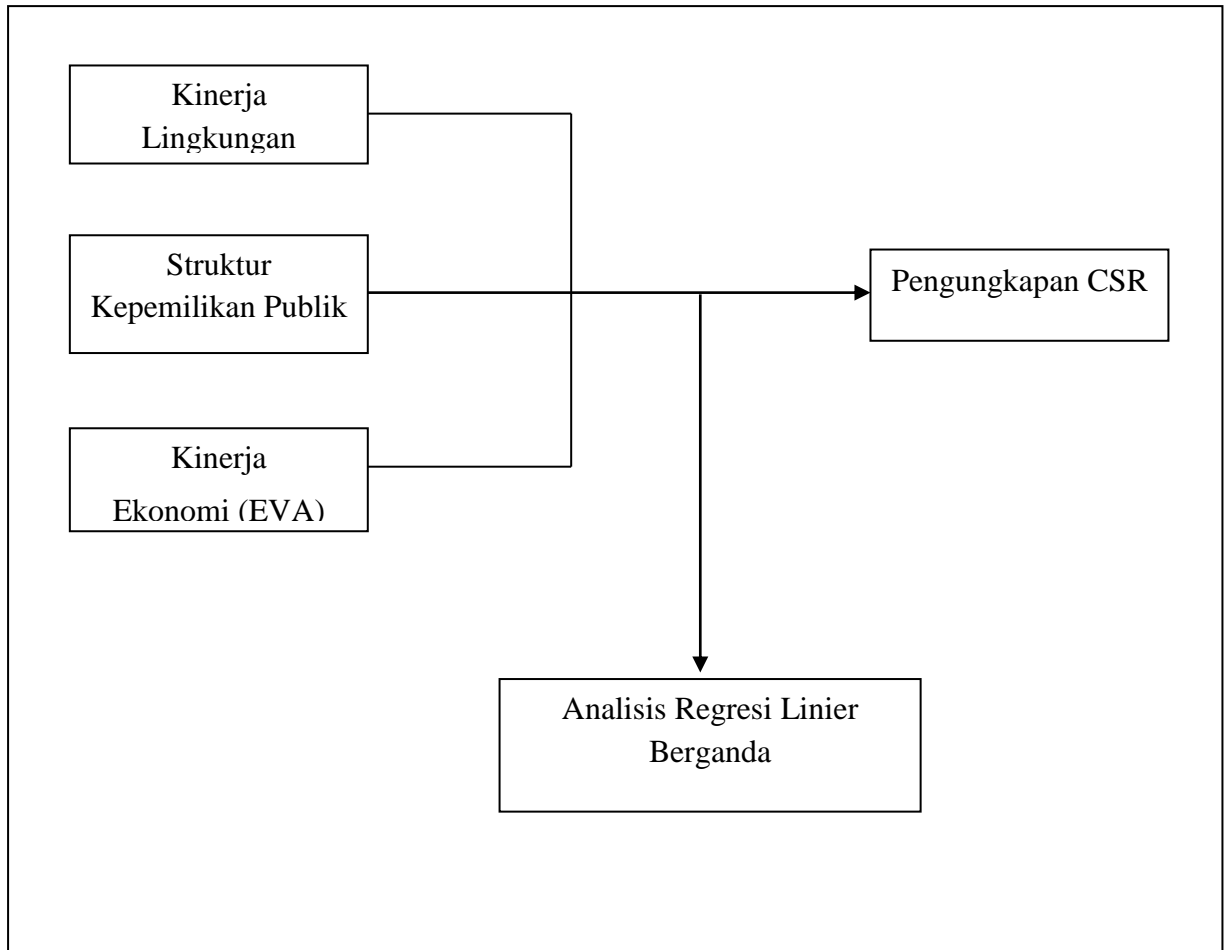
Penelitian Yuniarta (2011) menjelaskan bahwa para investor tidak merespon atas pengungkapan CSR yang telah dilakukan perusahaan. Dalam penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh kinerja terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan asumsi diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Economic Value Added* tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR

2.4. Kerangka Konseptual (Framework)

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang praktek pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh kinerja lingkungan, kepemilikan saham publik dan kinerja ekonomi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas kinerja lingkungan, kepemilikan saham publik dan kinerja ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang dipercaya sebagai perusahaan beresiko lingkungan yang tinggi. Jika suatu perusahaan melakukan pengungkapan mengenai perhatiannya terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut akan lebih dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Selain itu dengan

besarnya saham yang beredar dimasyarakat akan menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap lingkungan dan memperluas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Begitu pula dengan kinerja ekonomi perusahaan, dimana dengan kinerja ekonomi yang baik yang ditunjukkan melalui laba yang tinggi maka perusahaan akan memberikan tindakan yang lebih luas dalam melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sehingga perusahaan akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat mengenai keberadaan perusahaan tersebut yang telah melakukan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini telah didukung dengan teori legitimasi yang juga sangat penting dalam keberlangsungan perusahaan.